

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Investasi merupakan salah satu sumber penting bagi kemajuan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Kemajuan ekonomi juga selalu dibarengi dengan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang berkelanjutan. Peran investasi di sini sangat penting demi mencapai hal-hal tersebut, di mana dengan adanya investasi dapat mendorong terjadinya percepatan ekonomi nasional. Di samping berupaya menggali sumber pembiayaan dalam negeri, pemerintah juga mengundang sumber pembiayaan luar negeri, salah satunya adalah *foreign direct investment* (Sarwedi, 2002).

Dalam paradigma eklektik atau OLI yang dikembangkan oleh Dunning (1980), faktor lokasi (*Location Advantages*) menjadi salah satu determinan utama yang mempengaruhi arus FDI ke suatu negara. Faktor lokasi tidak hanya mencakup aspek geografis dan sumber daya alam, tetapi juga mencakup aspek kelembagaan seperti kebijakan pemerintah (kebijakan defisit APBN dan kontrol atas inflasi), stabilitas regulasi, dan kepastian hukum. Negara dengan kualitas kebijakan yang baik misalnya dalam bentuk regulasi yang ramah investasi, proses perizinan yang efisien, serta transparansi fiskal dan moneter akan memberikan sinyal positif kepada investor asing. Hal ini juga berlaku untuk kepastian hukum, yang mencerminkan keberadaan sistem hukum yang adil, konsisten, dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa. Ketika investor merasa bahwa hak-haknya terlindungi oleh sistem hukum dan kebijakan yang stabil, maka risiko

investasi menurun, dan daya tarik negara tersebut sebagai tujuan FDI akan meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2024) menyatakan bahwa regulasi yang baik menciptakan lingkungan investasi yang kondusif dan dapat memberikan kepastian hukum serta keamanan kepada investor asing. Kualitas regulasi yang tinggi memberikan sinyal positif kepada para investor, menciptakan rasa percaya dan kenyamanan dalam menanamkan modal mereka di suatu negara. Sehingga, regulasi yang efektif dan transparan dapat dianggap sebagai pilar utama dalam membangun iklim investasi yang menarik dan berkelanjutan di wilayah ASEAN.

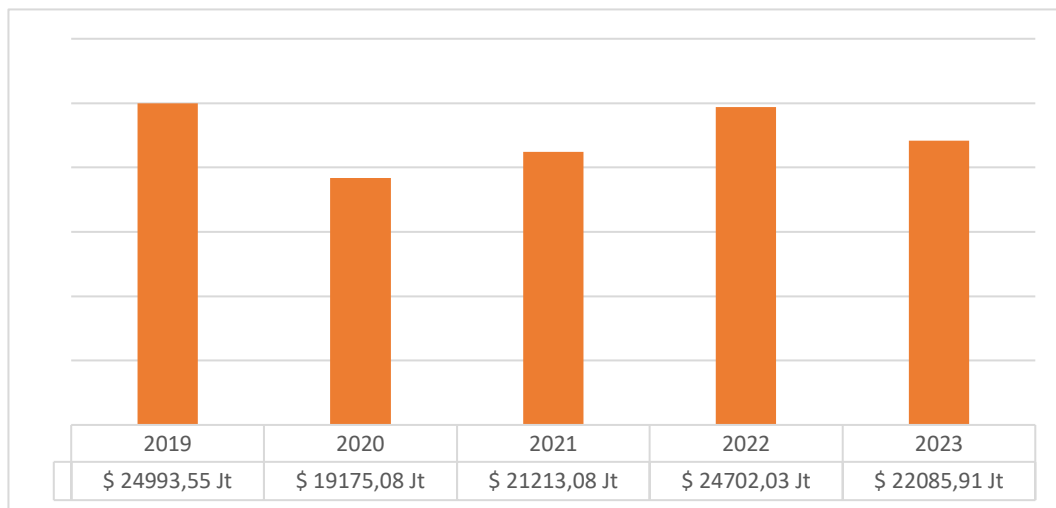
Saat ini, *foreign direct investment* global mengalami tantangan besar yang mempengaruhi alokasi dan sumber investasi. Pada tahun 2023, FDI turun sebesar 2%, terutama karena kondisi ekonomi yang melemah dan ketegangan geopolitik, seperti konflik Rusia-Ukraina dan ketidakpastian di Gaza. Penurunan ini sangat terasa dalam investasi proyek-proyek hijau, terutama di sektor terkait *sustainable development goals* (SDGs) seperti pangan dan air, yang penting bagi Pembangunan berkelanjutan, khususnya di negara berkembang (UNCTAD, 2024).

Menurut Dettoni (2023) ada lima faktor utama yang diprediksi akan mempengaruhi siklus *foreign direct investment*, termasuk pemilihan umum besar-besaran di berbagai negara, kebijakan geopolitik, kembalinya investor Tiongkok setelah pembatasan *Covid-19*, pertumbuhan investasi di sektor energi untuk mendukung transisi energi, serta penerapan *AI* yang dapat mengubah industri tenaga kerja padat karya.

Kecerdasan buatan atau *AI* kini mendapatkan aliran *foreign direct investment* yang signifikan karena dianggap sebagai solusi dalam menghadapi kekurangan tenaga kerja di banyak negara. Pada tahun 2024 Microsoft mengumumkan rencana investasi senilai US\$1,7 miliar di Indonesia selama empat tahun mendatang, yang mencakup pengembangan infrastruktur *cloud* dan *AI*, program pelatihan keterampilan *AI* untuk 840.000 orang, serta dukungan bagi komunitas pengembangan lokal yang terus berkembang. Investasi ini menjadi komitmen terbesar Microsoft di Indonesia sepanjang 29 tahun keberadaannya di negara ini. Tren ini menunjukkan bahwa meskipun FDI secara global melambat, namun tetap ada pada sektor-sektor tertentu seperti teknologi yang terus menarik minat investor karena kebutuhan jangka panjang untuk beradaptasi dengan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berbasis teknologi tinggi.

Di Indonesia sendiri *foreign direct investment* atau FDI merupakan salah satu investasi yang dapat membantu kemajuan perekonomian. Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang menggunakan sistem ekonomi terbuka yang pada pelaksanaannya selalu berkaitan dengan pengaruh investasi swasta maupun luar negeri. FDI dapat berperan penting dalam mendorong pertumbuhan PDB dan memberdayakan sektor keuangan domestik dengan menyediakan pembiayaan ekuitas yang esensial. Otoritas Investasi Indonesia (INA) secara khusus fokus menarik FDI untuk mendukung pengembangan infrastruktur dan mendorong industri baru, yang sangat penting untuk menuju ekonomi yang berkelanjutan dan terdiversifikasi (Yurioputra, 2022).

Dalam hal ini *foreign direct invesment* tidak hanya membawa modal namun juga teknologi, keterampilan manajerial, dan akses ke pasar internasional. Oleh karena itu, *foreign direct invesment* menjadi prioritas bagi banyak negara, termasuk di Indonesia. Namun, arus *foreign direct invesment* ke Indonesia tidak selalu stabil dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik domestik maupun eksternal.



Sumber: World Bank (diolah)

**Gambar 1. 1 Foreign Direct Invesment di Indonesia Tahun 2019-2023
(Juta US\$)**

Berdasarkan gambar 1.1 *net inflow foreign direct invesment* (FDI) Indonesia berfluktuasi pada periode tahun 2019-2023 yang merupakan periode pra pandemi, pandemi, dan pasca pandemi. Pada tahun 2019, FDI Indonesia berada pada tingkat 24.993,55 (Juta US\$), paling tinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Ini mencerminkan kepercayaan investor yang relatif tinggi sebelum terjadinya pandemi *Covid-19*. Pada tahun 2020 FDI menurun tajam menjadi 19.175,08 Juta US\$, kemungkinan besar karena merebaknya pandemi *COVID-19* yang berdampak

pada ekonomi global. Tahun 2021 menjadi awal pemulihan ekonomi, terlihat bahwa FDI meningkat menjadi 21.213,08 Juta US\$, dan pada tahun 2022 FDI Indonesia hampir kembali ke tingkat sebelum pandemi yakni 24.702,03 Juta US\$. Lonjakan ini mencerminkan peningkatan minat investasi di sektor-sektor yang mulai pulih, seperti energi dan logistik, yang didorong oleh tren transisi energi di tingkat global. Namun, pada tahun 2023 FDI mengalami sedikit penurunan menjadi 22.085,91 Juta US\$. Hal ini terjadi karena faktor ketidakpastian ekonomi global akibat ketegangan geopolitik dan fluktuasi harga komoditas.

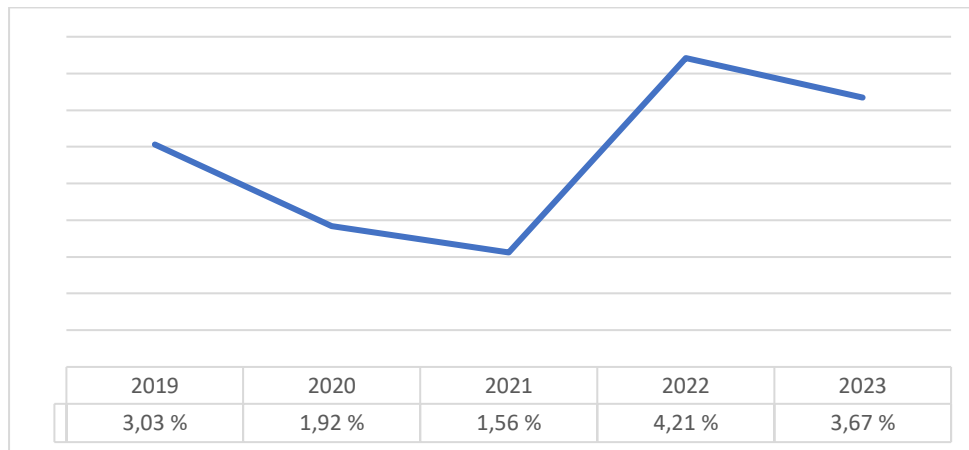
Arus masuk FDI ke Indonesia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi tolak ukur keputusan investasi para investor. Keputusan investasi akan dibuat ketika faktor-faktor tersebut memenuhi kriteria. Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel yang dapat dianggap sebagai indikator penting dalam menentukan kelayakan investasi, seperti *regulatory quality*, Inflasi, dan juga surplus defisit APBN.

Regulatory quality atau kualitas kebijakan regulasi memiliki hubungan penting dalam pengambilan keputusan investor (Septiantoro et al., 2020). Kualitas regulasi yang baik menunjukkan adanya kebijakan yang transparan, stabil, dan konsisten, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif dan dapat diprediksi bagi para investor asing. Investor cenderung lebih tertarik untuk menanamkan modal di negara yang memiliki regulasi yang efektif dan efisien, karena hal ini mengurangi risiko terkait perizinan, kepastian hukum, dan keamanan investasi. Penyebab penurunan investor asing diakibatkan oleh sistem pemerintahan yang

terlalu ketat. Regulasi atau aturan yang tidak terlampau ketat merupakan cara untuk menarik aliran modal masuk (Drajat, 2022).

Di Indonesia, perbaikan kualitas regulasi melalui penyederhanaan prosedur bisnis, peningkatan transparansi, serta penguatan hukum perlindungan investasi menjadi faktor penting dalam menarik arus masuk FDI, karena dengan adanya kebijakan yang mendukung, para investor dapat lebih yakin akan prospek dan stabilitas investasi mereka di pasar domestik. Perubahan kebijakan ekonomi di Indonesia telah memberikan dampak signifikan terhadap arus FDI. Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai reformasi ekonomi untuk meningkatkan daya tarik negara bagi investor asing. Salah satu kebijakan utama adalah Undang-undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) yang disahkan pada tahun 2020. Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan prosedur administrasi, serta mengurangi birokrasi yang dapat menghambat investasi. Beberapa sektor yang sebelumnya memiliki regulasi ketat, seperti pertanian dan tenaga kerja, kini lebih terbuka bagi investor asing. Hal ini memberi peluang bagi FDI untuk masuk lebih mudah dan cepat, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Inflasi merupakan salah satu indikator makroekonomi yang dapat mempengaruhi daya tarik suatu negara bagi investor asing. Tingkat inflasi yang stabil dan terkendali menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Oleh karena itu, menjaga stabilitas inflasi menjadi prioritas dalam menarik arus FDI (Abdullah et al., 2024).



Sumber: World Bank (diolah)

Gambar 1. 2 Inflasi di Indonesia Tahun 2019-2023 (Persen)

Berdasarkan gambar 1.2 Indonesia mengalami tantangan dalam menjaga stabilitas inflasi. Terlihat pada tahun 2020 Indonesia mengalami penurunan inflasi yang diakibatkan oleh pandemi *COVID-19* yang melumpuhkan aktivitas ekonomi global. Lonjakan inflasi pada tahun 2022 mencerminkan efek pemulihan ekonomi pasca pandemi, diiringi oleh kenaikan harga komoditas global serta adanya kebijakan ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi. Penurunan pada tahun 2023 yang menandakan adanya stabilisasi meskipun inflasi relatif tetap tinggi dibandingkan periode awal.

Inflasi yang terkendali merupakan indikator kesehatan ekonomi, namun ketika inflasi tidak disadari atau tidak dipahami dengan baik, dampaknya bisa merugikan sektor konsumsi, daya beli masyarakat, dan juga investasi (Louis, 2024). Investor cenderung enggan menanamkan modalnya di negara dengan tingkat inflasi yang tinggi atau tidak stabil karena hal ini menciptakan risiko ekonomi yang lebih besar. Nilai uang yang berkurang akibat inflasi akan mempengaruhi *return non invesment*, sehingga mengurangi minat investor asing maupun domestik. Inflasi yang menurun

akan meningkatkan FDI karena menciptakan situasi ekonomi yang stabil (Aimon et al., 2020).

Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terjadi ketika pengeluaran pemerintah melebihi pendapatan yang diperoleh dalam suatu periode. Sebaliknya, jika pendapatan lebih besar daripada pengeluaran, maka kondisi tersebut disebut surplus APBN. Menurut Rahayu (2011) situasi ini dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap perekonomian, termasuk pada FDI di Indonesia. Di satu sisi, defisit APBN yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan investasi strategis dapat menciptakan iklim ekonomi yang lebih kondusif dan menarik minat investor asing. Namun, apabila defisit tidak dikelola dengan baik malah akan memicu ketidakstabilan ekonomi sehingga mengurangi kepercayaan investor terhadap prospek investasi di Indonesia (Paramita, 2023).



Sumber: World Bank (diolah)

Gambar 1. 3 Defisit APBN di Indonesia Tahun 2019-2023 (Triliun Rupiah)

Dari gambar 1.3 dapat terlihat bahwa dalam lima tahun terakhir APBN Indonesia terus-menerus berada dalam posisi defisit. Tahun 2020 menjadi tahun

dengan peningkatan defisit yang tajam, sekali lagi dikarenakan pandemi *COVID-19*. Tajamnya peningkatan ini karena tingginya kebutuhan belanja negara untuk penanganan krisis kesehatan dan juga pemulihan ekonomi. Namun, seiring dengan membaiknya pemulihan ekonomi, defisit semakin terkendali dan terus mengalami penurunan secara bertahap. Penurunan defisit APBN ini dapat memberikan sinyal positif bagi investor asing, karena menunjukkan stabilitas fiskal dan komitmen pemerintah dalam mengelola anggaran negara dengan baik. Defisit APBN dikatakan stabil apabila jumlah defisit berada dalam batas yang dapat dikelola oleh pemerintah tanpa mengganggu keseimbangan ekonomi makro. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003, defisit APBN dibatasi maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk menjaga stabilitas fiskal.

Penelitian ini dilakukan karena melihat pergerakan FDI yang tidak konsisten. Ditakutkan apabila Indonesia gagal untuk meningkatkan FDI, dalam jangka pendek celah pembiayaan pembangunan ekonomi akan dipenuhi melalui utang. Dalam jangka panjang hal ini berisiko memicu krisis fiskal karena rasio utang Indonesia yang terus meningkat (Pratiwi, 2023).

Penanaman Modal Asing (FDI) di Indonesia tidak lepas dari dampak krisis keuangan global, yang kerap memicu keketatan likuiditas dan pengetatan arus modal. Saat investor di negara maju menghadapi tekanan pasar domestik, mereka cenderung merepatriasi dana dan menahan ekspansi ke luar negeri, termasuk ke negara berkembang. Akibatnya, pada krisis tahun 2008 realisasi PMA di Indonesia mengalami kontraksi signifikan aliran modal asing yang semula meningkat sebelum

krisis dipaksa turun drastis sepanjang 2008–2009. Penurunan ini mencerminkan kecenderungan investor global mencari “*safe haven*” dan menunda proyek baru, sehingga menekan pertumbuhan investasi dan stabilitas ekonomi domestik (Sriwardiningsih, 2010).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, secara umum *foreign direct invesment* menjadi salah satu alternatif pemerintah dalam menguatkan perekonomian di Indonesia. Selain faktor makroekonomi seperti inflasi ada juga faktor seperti kondisi APBN yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami defisit sehingga menjadi pertimbangan bagi para investor untuk menginvestasikan asetnya. Variabel seperti kualitas kebijakan dan kepastian hukum kiranya juga menjadi suatu hal yang perlu untuk dipertimbangkan investor. Dalam beberapa tahun terakhir Indonesia sudah mulai berbenah dalam membuat birokrasi investasi lebih mudah sehingga membuat investor asing dapat memilih Indonesia sebagai tujuan investasinya. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kualitas Kebijakan, Kepastian Hukum, Inflasi, dan Defisit APBN terhadap *Foreign Direct Invesment* (FDI) di Indonesia 2002-2023 (Analisis *Autoregressive Distributed Lag*/ARDL)”. Dengan kebaruan penelitian berupa integrasi faktor institusional (kualitas kebijakan, kepastian hukum) dan makroekonomi (inflasi, defisit APBN) dalam satu model. Dengan metode analisis *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) yang memungkinkan analisis jangka pendek dan jangka panjang, sehingga rekomendasi kebijakan dapat dibedakan berdasarkan horizon waktu.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kualitas kebijakan, kepastian hukum, inflasi, defisit APBN, krisis keuangan dalam jangka pendek terhadap *foreign direct invesment* di Indonesia pada tahun 2002-2023?
2. Bagaimana pengaruh kualitas kebijakan, kepastian hukum, inflasi, defisit APBN, dan krisis keuangan dalam jangka panjang terhadap *foreign direct invesment* di Indonesia pada tahun 2002-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas kebijakan, kepastian hukum, inflasi, defisit APBN, dan krisis keuangan dalam jangka pendek terhadap *foreign direct invesment* di Indonesia pada tahun 2002-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas kebijakan, kepastian hukum, inflasi, defisit APBN, dan krisis keuangan dalam jangka panjang terhadap *foreign direct invesment* di Indonesia pada tahun 2002-2023.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, di antaranya:

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Dengan adanya variabel nonekonomi, yaitu kualitas kebijakan dan kepastian hukum sebagai variabel yang diduga dapat mempengaruhi *foreign direct investment* di Indonesia, dan variabel inflasi serta defisit APBN serta keterlibatan krisis keuangan yang selanjutnya ingin diketahui bagaimana pengaruhnya terhadap *foreign direct investment*. Diharapkan pula dapat digunakan sebagai referensi atau acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan atau pengambilan keputusan yang berkaitan dengan *foreign direct investment* di Indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai *foreign direct investment* di Indonesia.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan pengambilan data dari situs Badan Pusat Statistik dan World Bank, serta beberapa jurnal dan media *online* yang relevan dan terpercaya.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan sejak diterbitkannya surat keputusan pembimbing skripsi. Adapun jadwal penelitian yang dilaksanakan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jadwal Penelitian

[illegible]